

BAB 1 LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk dan jumlah rumah tangga yang paling besar di Indonesia (Daniswari, 2021) dan memiliki potensi besar bagi dunia bisnis termasuk bisnis pendidikan. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan wilayahnya berbatasan langsung dengan ibukota negara memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar dalam pelaksanaan pendidikan dan mendukung pemerintahan Indonesia. Secara administratif, wilayah Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota dan 9 kota. Dapat terlihat seperti Tabel 1.1, komposisi jumlah penduduk di Jawa Barat dari tahun 2016 -2020 yang selalu meningkat setiap tahun dan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)

Wilayah Jawa Barat	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)				
	2020	2019	2018	2017	2016
Bogor	6.088.233	5.965.410	5.840.907	5.715.009	5.587.390
Sukabumi	2.470.219	2.466.272	2.460.693	2.453.498	2.444.616
Cianjur	2.264.328	2.263.072	2.260.620	2.256.589	2.250.977
Bandung	3.831.505	3.775.279	3.717.291	3.657.601	3.596.623
Garut	2.636.637	2.622.425	2.606.399	2.588.839	2.569.505
Tasikmalaya	1.755.710	1.754.128	1.751.295	1.747.318	1.742.276
Ciamis	1.201.685	1.195.176	1.188.629	1.181.981	1.175.389
Kuningan	1.087.105	1.080.804	1.074.497	1.068.201	1.061.886
Cirebon	2.209.633	2.192.903	2.176.213	2.159.577	2.142.999
Majalengka	1.210.709	1.205.034	1.199.300	1.193.725	1.188.004
Sumedang	1.154.428	1.152.400	1.149.906	1.146.435	1.142.097
Indramayu	1.737.624	1.728.469	1.719.187	1.709.994	1.700.815
Subang	1.612.576	1.595.825	1.579.018	1.562.509	1.546.000
Purwakarta	971.889	962.893	953.414	943.337	932.701
Karawang	2.370.488	2.353.915	2.336.009	2.316.489	2.295.778
Bekasi	3.899.017	3.763.886	3.630.907	3.500.023	3.371.691
Bandung Barat	1.714.982	1.699.896	1.683.711	1.666.510	1.648.387
Pangandaran	401.493	399.284	397.187	395.098	392.817
Kota Bogor	1.126.927	1.112.081	1.096.828	1.081.009	1.064.687
Kota Sukabumi	330.691	328.680	326.282	323.788	321.097
Kota Bandung	2.510.103	2.507.888	2.503.708	2.497.938	2.490.622
Kota Cirebon	322.322	319.312	316.277	313.325	310.486
Kota Bekasi	3.075.690	3.003.923	2.931.897	2.859.630	2.787.205
Kota Depok	2.484.186	2.406.826	2.330.333	2.254.513	2.179.813
Kota Cimahi	620.393	614.304	607.811	601.099	594.021
Kota Tasikmalaya	663.986	663.517	662.723	661.404	659.606

Kota Banjar	183.299	183.110	182.819	182.388	181.901
-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah penduduk tertinggi di Jawa Barat meliputi daerah Bogor, Bekasi, Kota Bekasi dan Bandung. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa empat daerah tersebut mempunyai potensi dalam pengembangan SDM, industri maupun bidang lain. Begitu pula dengan jumlah rumah tangga di Jawa Barat yang hampir semua wilayah mengalami kenaikan seperti tampak pada Tabel 1.2. Jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga menjadi indikasi terhadap laju pertumbuhan penduduknya. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy penambahan jumlah penduduk dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)” (kemenkopmk, 2021). Berdasarkan hal tersebut, Jawa Barat khususnya di empat daerah itu, memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan potensi terutama dalam menciptakan SDM unggul.

Tabel 1.2 Jumlah Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Rumah Tangga)

Wilayah Jawa Barat	Jumlah Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Rumah Tangga)				
	2020	2019	2018	2017	2016
Bogor	1.510.140	1.476.474	1.445.658	1.414.498	1.382.911
Sukabumi	665.123	668.101	666.591	664.641	662.236
Cianjur	614.454	618.587	617.917	616.814	615.281
Bandung	982.651	970.457	955.550	940.207	924.532
Garut	658.461	656.977	652.962	648.563	643.719
Tasikmalaya	489.329	491.437	490.643	489.529	488.116
Ciamis	357.900	358.099	356.137	354.145	352.170
Kuningan	277.855	277.287	275.668	274.053	272.433
Cirebon	583.038	579.714	575.302	570.905	566.521
Majalengka	355.894	355.679	353.986	352.340	350.652
Sumedang	343.472	343.423	342.679	341.645	340.352
Indramayu	505.750	504.412	501.703	499.020	496.341

Subang	458.658	456.704	451.893	447.169	442.444
Purwakarta	254.585	252.733	250.245	247.600	244.808
Karawang	633.759	630.873	626.073	620.842	615.291
Bekasi	1.048.753	1.008.168	972.549	937.492	903.117
Bandung Barat	450.271	448.170	443.903	439.368	434.590
Pangandaran	119.577	119.634	119.005	118.379	117.696
Kota Bogor	277.482	273.827	270.071	266.176	262.157
Kota Sukabumi	84.145	83.633	83.023	82.388	81.704
Kota Bandung	670.159	669.568	668.452	666.911	664.958
Kota Cirebon	82.454	81.684	80.908	80.153	79.426
Kota Bekasi	789.134	770.721	752.241	733.699	715.117
Kota Depok	628.939	609.353	589.987	570.791	551.879
Kota Cimahi	166.888	165.251	163.504	161.698	159.794
Kota Tasikmalaya	172.004	172.049	171.842	171.500	171.035
Kota Banjar	50.740	50.845	50.764	50.645	50.510

Sumber : BPS, 2021

Bogor, Bekasi, Bandung dan juga Kota Bekasi, berdasarkan Tabel 1.2 merupakan empat daerah yang memiliki jumlah rumah tangga yang paling tinggi di Jawa Barat. Seperti jumlah penduduk pada uraian di atas, jika dilihat dari jumlah rumah tangga empat daerah tersebut juga memiliki peluang untuk berkembang, karena dengan jumlah rumah tangga yang semakin banyak akan melahirkan generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa sebagai modal dalam membangun SDM unggul yang dicita-citakan pemerintah. Dalam menciptakan generasi penerus yang unggul maka diperlukan pendidikan sebagai sarana utama untuk membentuk karakter dan kecerdasan generasi tersebut. Bagaimana lembaga pendidikan mengantisipasi jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga yang besar?

Berdasarkan kelompok umur di provinsi Jawa Barat, dapat dilihat seperti pada Tabel 1.3, bahwa jumlah penduduk yang termasuk dalam usia sekolah cukup tinggi. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Jawa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk mendukung terciptanya SDM unggul sejalan dengan kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah melalui Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan menjamin setiap penduduknya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

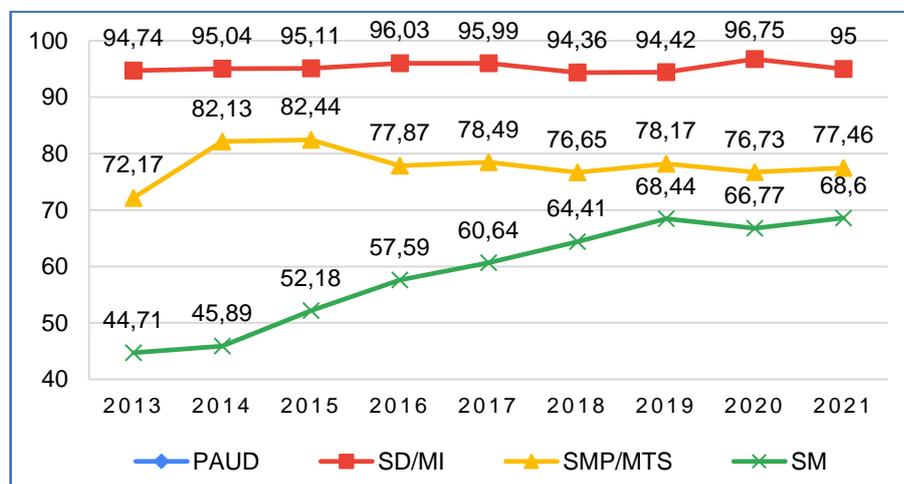
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jawa Barat, 2021

Kelompok Umur	Jumlah
0- 4	3.931.166
5- 9	3.834.563
10-14	3.994.125
15-19	4.061.802
20-24	4.113.698
25-29	4.072.759
30-34	3.998.270
35-39	3.821.582
40-44	3.645.905
45-49	3.313.144
50-54	2.879.593
55-59	2.394.525
60-64	1.844.516
65-69	1.338.032
70-74	819.791
75+	718.931

Sumber : BPS, 2021

Dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas pemerintah perlu melakukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dari pihak swasta, sehingga percepatan pemerataan pendidikan dapat menjangkau bagi seluruh warga tanpa adanya pembatasan. Ketika semua warga dapat mengikuti pendidikan secara merata, maka hal tersebut dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dari

daerah tersebut. Dapat terlihat seperti grafik 1.1 mengenai perkembangan APM di provinsi Jawa Barat.



Grafik 1.1 Perkembangan APM Jawa Barat, 2021

Sumber: kemdikbud, 2021

Perkembangan APM Jawa Barat pada tahun 2021 seperti terlihat pada grafik 1.1, bahwa nilai APM untuk tingkat SMA/SMK/MA/Sederajat walaupun setiap tahun meningkat namun **nilainya masih rendah yaitu 68,6**. Ini berarti bahwa jumlah anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tersebut masih sedikit. Menjadi pertanyaan mengapa banyak anak usia tersebut, tidak mengikuti sekolah menengah lanjutan khususnya SMA/SMK/MA/Sederajat. Faktor apa saja yang menyebabkan tingkat APM pada jenjang tersebut rendah?

Partisipasi sekolah dapat menunjukkan proses dan bagaimana pendidikan yang berjalan di suatu negara. Proses pendidikan berkaitan erat dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan dapat menjadi indikator kecerdasan suatu bangsa.. Ketika penduduk memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, hal tersebut dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan IPM suatu negara. IPM negara Indonesia diperoleh berdasarkan rata - rata IPM dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil rekapitulasi IPM yang dilakukan oleh BPS diperoleh nilai IPM terutama dari provinsi Jawa Barat seperti terlihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Indeks Pembangunan Manusia				
	2021	2020	2019	2018	2017
Provinsi Jawa Barat	72.45	72.09	72.03	71.30	70.69
Bogor	70.60	70.40	70.65	69.69	69.13
Sukabumi	67.07	66.88	66.87	66.05	65.49
Cianjur	65.56	65.36	65.38	64.62	63.70
Bandung	72.73	72.39	72.41	71.75	71.02
Garut	66.45	66.12	66.22	65.42	64.52
Tasikmalaya	65.90	65.67	65.64	65.00	64.14
Ciamis	70.93	70.49	70.39	69.63	68.87
Kuningan	69.71	69.38	69.12	68.55	67.78
Cirebon	69.12	68.75	68.69	68.05	67.39
Majalengka	67.81	67.59	67.52	66.72	65.92
Sumedang	71.80	71.64	71.46	70.99	70.07
Indramayu	67.64	67.29	66.97	66.36	65.58
Subang	69.13	68.95	68.69	68.31	67.73
Purwakarta	70.98	70.82	70.67	69.98	69.28
Karawang	70.94	70.66	70.86	69.89	69.17
Bekasi	74.45	74.07	73.99	73.49	72.63
Bandung Barat	68.29	68.08	68.27	67.46	66.63
Pangandaran	68.28	68.06	68.21	67.44	66.60
Kota Bogor	76.59	76.11	76.23	75.66	75.16
Kota Sukabumi	74.60	74.21	74.31	73.55	73.03
Kota Bandung	81.96	81.51	81.62	81.06	80.31
Kota Cirebon	75.25	74.89	74.92	74.35	74.00
Kota Bekasi	81.95	81.50	81.59	81.04	80.30
Kota Depok	81.37	80.97	80.82	80.29	79.83
Kota Cimahi	78.06	77.83	78.11	77.56	76.95

Kota Tasikmalaya	73.31	73.04	72.84	72.03	71.51
Kota Banjar	71.92	71.70	71.75	71.25	70.79

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan tabel 1.4, IPM provinsi Jawa Barat rata - rata dari tahun 2017-2021 adalah 71,71. Nilai yang tinggi namun **masih perlu ditingkatkan** sehingga dapat mencapai nilai maksimal. Terdapat tiga wilayah yang memiliki rata - rata nilai IPM sangat tinggi sejak tahun 2017 - 2021 yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi dan Depok yang memiliki IPM di atas 80 an. Hal ini menandakan bahwa pembangunan di wilayah tersebut pada berbagai sektor, terutama pendidikan berjalan dengan sangat baik. Namun nilai tersebut masih dapat ditingkatkan menjadi 100%. Pertanyaan selanjutnya adalah apa kebijakan pemerintah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan nilai IPM pada bidang pendidikan? Lembaga pendidikan swasta, sebagai rekan kerja pemerintah guna mewujudkan terciptanya SDM unggul, seharusnya mampu melihat situasi tersebut sebagai peluang bisnis sehingga muncul pertanyaan, apa strategi lembaga pendidikan swasta dalam meningkatkan nilai IPM kota tersebut.

IPM juga dapat diukur melalui tingkat kesejahteraan penduduknya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat tingkat pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat pada suatu wilayah. Berdasarkan tabel 1.5, terlihat bahwa pendapatan pemerintah provinsi Jawa Barat selalu mengalami kenaikan. Bahkan pada tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 25,06 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Jumlah itu meningkat 35,3% dari realisasi APBD 2020 yang sebesar Rp 18,52 triliun (katadata, 2022). Adapun, penerimaan dari pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp 3,2 triliun. Sehingga, total penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 44,71 triliun pada APBD 2021.

Tabel 1.5 Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Ribu Rupiah)

Kabupaten/ Kota	Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)			
	2019	2018	2017	2016
Bogor	2.451.753.202	2.794.723.740	3.041.872.448	2.299.862.659
Sukabumi	556.744.295	565.369.087	799.499.855	548.936.313
Cianjur	602.556.114	569.844.591	535.232.527	455.156.877
Bandung	849.284.377	927.543.321	858.875.587	856.514.244
Garut	472.939.892	421.299.024	688.910.453	400.395.596
Tasikmalaya	257.296.743	248.420.386	406.334.652	216.227.322
Ciamis	238.094.915	234.610.670	222.938.975	204.759.436
Kuningan	331.071.737	303.218.053	346.954.340	262.212.854
Cirebon	597.481.096	584.810.843	557.754.725	529.050.285
Majalengka	473.450.000	449.588.421	513.783.824	331.527.582
Sumedang	530.215.807	432.196.795	553.257.333	345.804.642
Indramayu	439.593.641	419.892.815	577.594.379	351.177.414
Subang	473.715.728	400.755.045	234.641.213	360.621.618
Purwakarta	464.858.009	368.851.053	472.480.561	341.116.103
Karawang	1.414.407.023	1.169.569.261	1.398.309.963	1.003.354.916
Bekasi	2.183.381.401	2.094.369.342	2.311.805.849	1.917.814.674
Bandung Barat	581.055.645	422.495.954	609.916.388	376.220.675
Pangandaran	144.933.724	111.217.120	118.011.275	66.385.348
Kota Bogor	944.394.651	912.197.971	977.803.907	783.873.587
Kota Sukabumi	376.146.457	362.342.291	359.024.020	295.257.671
Kota Bandung	3.055.014.614	2.571.591.784	2.578.457.421	2.152.755.704
Kota Cirebon	478.150.076	440.169.143	443.929.980	363.115.251
Kota Bekasi	3.273.595.338	2.001.150.459	1.757.641.804	1.686.600.487
Kota Depok	1.114.036.195	1.059.700.282	1.210.748.606	922.533.784

Kota Cimahi	444.244.273	335.016.530	383.911.991	286.049.614
Kota Tasikmalaya	298.057.366	280.014.888	354.840.204	254.532.700
Kota Banjar	131.881.763	116.167.056	125.454.618	116.321.781
Provinsi Jawa Barat	19.759.789.101	19.642.915.449	17.102.520.316	17.042.895.114

Sumber : BPS, 2021

Kota Bekasi menjadi wilayah yang memiliki pendapatan tertinggi dibandingkan daerah lainnya seperti dapat dilihat pada tabel 1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (kemenkeu, 2022). Pendapatan ini diperoleh dari pajak daerah dan penerimaan yang lain. Pendapatan ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berada di dalam suatu wilayah terutama dikarenakan penambahan dan pertumbuhan penduduk membawa pengaruh besar pada perekonomian masyarakat.

Perekonomian masyarakat di Kota Bekasi bertumbuh dari segi jasa, ekonomi dan kegiatan sosial sebesar 9,99% (mpp.bekasikota, 2022a). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan Kota Bekasi menjadi salah satu kota di Jawa Barat yang cukup berpotensi untuk dikembangkan. Pendapatan yang tinggi memungkinkan terciptanya peluang dalam melakukan usaha di berbagai bidang khususnya bidang pendidikan, walaupun Kota Bekasi juga harus memikirkan pendidikan bagi penduduk miskin yang berada di Jawa Barat. Bagaimana lembaga penyelenggara pendidikan mengantisipasi pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi?

Tabel 1.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan /rupiah/kapita/bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021

Bogor	402.877	418.483	465,67	491,24	7,69	8,13
Sukabumi	328.284	342.094	175,10	194,35	7,09	7,70
Cianjur	371.699	387.631	234,47	260,02	10,36	11,18
Bandung	367.403	378.819	263,60	269,18	6,91	7,15
Garut	310.437	320.050	262,78	281,36	9,98	10,65
Tasikmalaya	323.880	333.909	181,52	200,59	10,34	11,15
Ciamis	378.108	389.676	91,39	96,60	7,62	7,97
Kuningan	352.358	358.069	139,20	143,35	12,82	13,10
Cirebon	393.452	404.635	247,94	271,02	11,24	12,30
Majalengka	453.201	466.813	138,21	151,14	11,43	12,33
Sumedang	353.092	360.054	118,38	126,28	10,26	10,71
Indramayu	474.807	481.754	220,31	228,59	12,70	13,04
Subang	351.885	360.691	149,81	158,97	9,31	10,03
Purwakarta	378.287	387.754	80,17	84,27	8,27	8,83
Karawang	466.152	494.201	195,41	210,78	8,26	8,95
Bekasi	518.667	549.875	186,30	202,73	4,82	5,21
Bandung Barat	362.212	374.470	179,46	190,77	10,49	11,30
Pangandaran	382.264	394.101	36,05	39,07	8,99	9,65
Kota Bogor	547.399	571.425	75,04	80,09	6,68	7,24
Kota Sukabumi	547.415	567.734	25,42	27,19	7,70	8,25
Kota Bandung	500.452	515.396	100,02	112,50	3,99	4,37
Kota Cirebon	457.954	467.248	30,61	31,98	9,52	10,03
Kota Bekasi	657.953	692.885	134,01	144,12	4,38	4,74
Kota Depok	688.194	705.084	60,43	63,86	2,45	2,58
Kota Cimahi	511.375	522.281	31,64	32,48	5,11	5,35
Kota Tasikmalaya	470.150	480.341	86,13	89,46	12,97	13,13
Kota Banjar	344.363	357.210	11,16	13,37	6,09	7,11
Jawa Barat	410.988	427.402	3.920,23	4.195,34	7,88	8,40

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 1.6, dapat terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Kota Bekasi berada pada tiga posisi yang paling kecil dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi merupakan daerah yang memiliki kemampuan lebih baik dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kota Bekasi, penduduk memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk mengikuti pendidikan sampai jenjang tertinggi.

Dengan tingkat pendapatan yang paling tinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain, menjadikan Kota Bekasi sebagai kota satelit penopang ibu kota DKI Jakarta. Kota Bekasi kini bertransformasi menjadi **kawasan hunian kaum urban** serta pusat industri barang dan jasa (Purwanto, 2021). Dengan slogan “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan” (mpp.bekasikota, 2022b) diharapkan mampu menjadi arahan pembangunan kedepan. Secara lebih mendalam, visi Kota Bekasi digambarkan sebagai kota dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kota yang cerdas (*smart city*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga menjadi kota yang layak huni, dengan pembangunan wilayah dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kreatif dan inovatif, mampu membangun perekonomian yang baik dengan pertumbuhan investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat yang didukung oleh infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan secara berkesinambungan sehingga terciptanya kehidupan sosial kemasyarakatan yang sejahtera dan memiliki kesadaran perilaku yang baik. Dengan harapan dari pemerintah Kota Bekasi tersebut maka potensi pengembangan investasi di wilayah Kota Bekasi terbuka lebar, khususnya pendidikan. Pendidikan menjadi sarana utama untuk menjalankan visi Kota Bekasi Cerdas.

Kota Bekasi melakukan transformasi yang cukup signifikan, ditandai dengan maraknya pembangunan sarana transportasi, seperti jalan tol, MRT hingga jalan layang (Diva Kautsar, 2021). Gencarnya pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah terutama di bidang transportasi memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi perkembangan kawasan dan akan mengubah wajah Kota Bekasi menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Pembangunan di bidang transportasi juga terintegrasi dengan pembangunan perumahan. Konsep perumahan atau hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi melalui LRT menjadi daya tarik masyarakat yang menjadi kaum sub urban dari Bekasi.

Perubahan besar di wilayah Kota Bekasi seperti pembangunan mega proyek *LRT City* di Bekasi, yaitu *LRT City Bekasi Eastern Green* dan *Green Avenue*, dapat menjadi solusi hunian terintegrasi dengan fasilitas transportasi umum. Ragam fasilitas disediakan di LRT Bekasi, seperti sarana *Bus Rapid Transit (BRT)* Trans Jabodetabek. Dengan adanya fasilitas tersebut akan semakin mempermudah masyarakat urban beraktivitas. Lokasi LRT yang strategis di antara titik 0 kilometer dari Stasiun LRT Jatimulya dan keluar Tol Bekasi Timur semakin memudahkan mobilitas masyarakat dan semakin meningkatkan *lifestyle* masyarakat Kota Bekasi.

Dengan fasilitas yang semakin lengkap dan kawasan hunian yang beraneka ragam meningkatkan minat kaum sub urban untuk memiliki hunian yang nyaman dan terjangkau di kawasan Kota Bekasi. Hal ini tentunya berdampak terhadap jumlah penduduk yang menghuni di kawasan tersebut. Semakin meningkatnya penduduk berarti akan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Penduduk yang semakin banyak juga semakin meningkatkan peluang dalam melakukan berbagai kegiatan yang mampu mendorong perekonomian penduduk dan pemerintah. Salah satu peluang yang memiliki potensi besar adalah pendidikan.

Kota Bekasi sebagai kota metropolitan dengan fasilitas dan gaya hidup yang semakin meningkat, menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah dan secara khusus lembaga pendidikan dari pihak swasta untuk menyelenggarakan pendidikan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan pendidikan diharapkan dapat menyiapkan SDM unggul untuk mendukung visi Indonesia menciptakan SDM unggul. Lembaga pendidikan adalah salah satu penyumbang terciptanya SDM unggul, sehingga pemerintah dan lembaga pendidikan swasta saling mendukung demi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Bagaimana lembaga pendidikan mengembangkan konsep pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jaman?

Lembaga XYZ merupakan lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang berlokasi di provinsi DKI Jakarta, Tangerang dan Jawa Barat (Bekasi). Lembaga XYZ telah beroperasi sejak tahun 1924 dan berfokus pada pengembangan manusia seutuhnya. Lembaga XYZ terdiri dari 74 TK/Sekolah yang tersebar di tiga provinsi. Partisipasi Lembaga XYZ sebagai lembaga pendidikan swasta di Indonesia pada wilayah provinsi tersebut sebagai wujud pemerataan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Dasar 1945. Lembaga XYZ terutama yang berada di wilayah provinsi Jawa Barat (Bekasi) memiliki peluang besar di Kota Bekasi sebagai penyelenggara pendidikan. Lembaga XYZ memiliki peluang dan tantangan untuk menciptakan SDM unggul terutama di Kota Bekasi sebagai kota metropolitan.

Untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK, Lembaga XYZ di Kota Bekasi memiliki masing - masing satu unit. Dapat dilihat seperti di Grafik 1.7, bahwa jumlah SMP SMA di Lembaga XYZ yang beroperasi sejak tahun 2018 selalu mengalami kenaikan. Berbanding terbalik dengan jenjang SMK yang selalu menurun setiap tahun sejak tahun 2017. Berdasarkan Grafik 1.1 bahwa nilai APM untuk jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat masih rendah dibandingkan jenjang pendidikan yang lain.

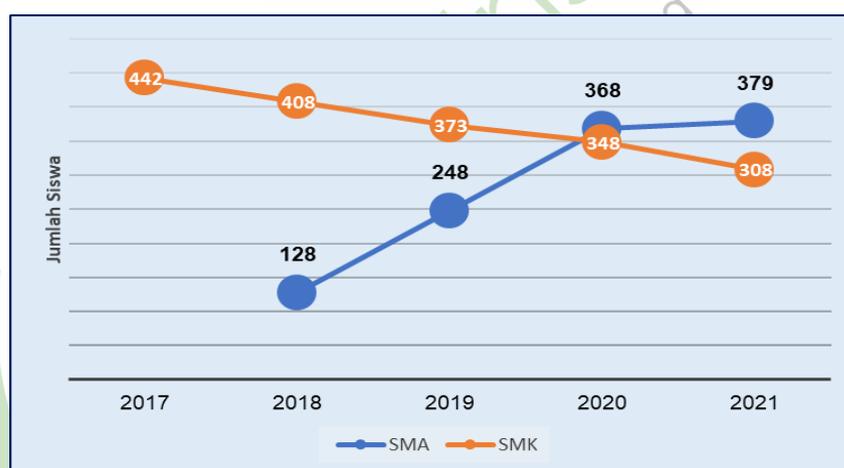
Tabel 1.7 Jumlah Sekolah Lembaga XYZ

Wilayah	TK	SD	SMP	SMA	SMK	TOTAL
A	5	5	5	0	2	17
B	3	8	4	0	1	16
C	6	8	6	1	1	22
D	5	7	4	1	1	18
Total	19	28	19	2	5	73

Sumber : Lembaga XYZ, 2021 diolah kembali

Berdasarkan Tabel 1.8 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sekolah di Lembaga XYZ di Kota Bekasi hanya memiliki satu unit SMA dan SMK. Untuk di Kota Bekasi sendiri jumlah SMA dan SMK swasta sangat besar yaitu 80% dan 89% dari masing – masing total sekolah. Hal ini tentunya menyebabkan persaingan

tersendiri bagi sekolah swasta untuk mendapatkan jumlah murid. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah sekolah SMP di Kota Bekasi adalah empat sekolah. Hal itu menunjukkan bahwa jumlah pemasok untuk jenjang SMA dan SMK sangat besar dan masih memiliki peluang. Namun adanya persaingan antar sekolah swasta tentunya hal tersebut mempengaruhi jumlah siswa yang masuk di SMA dan SMK Lembaga XYZ, termasuk adanya kebijakan sekolah gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah (Pahrevi, 2018). Berdasarkan grafik 1.3, SMA dan SMK Lembaga XYZ di Kota Bekasi tidak menjadi pilihan para lulusan SMP, hal tersebut nampak pada grafik 1.7 tersebut, bahwa jumlah siswa SMK dalam lima tahun terakhir menurun, sedangkan jumlah siswa di SMA meningkat namun tidak secara signifikan. Faktor apa saja yang menyebabkan SMA dan SMK Lembaga XYZ tidak menjadi pilihan utama lulusan SMP Lembaga XYZ dan sekolah lain?



Grafik 1.2 Jumlah siswa SMA & SMK Lembaga XYZ Wilayah Bekasi Periode 2017/2018 - 2021/2022

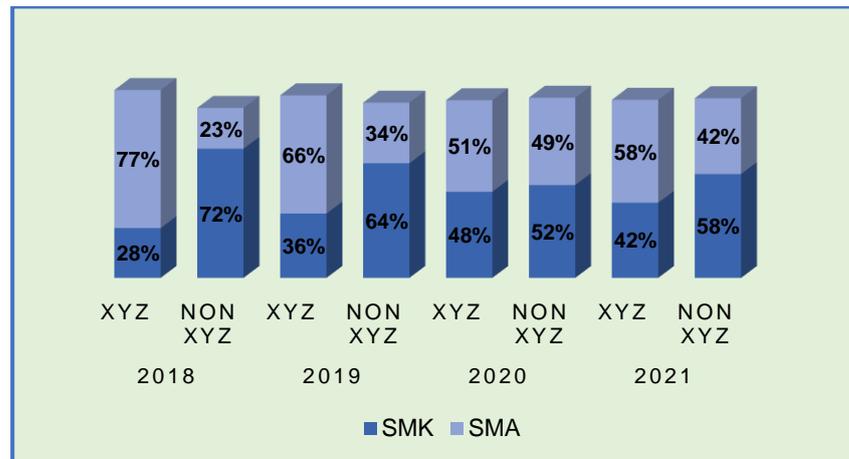
Sumber : Lembaga XYZ, 2021 diolah kembali

Dibukanya SMA baru turut pula menyebabkan siswa SMP cenderung memilih SMA dibandingkan dengan SMK. Hal tersebut didukung oleh pola pikir orang tua siswa yang cenderung memasukkan anaknya ke SMA. Selain dibukanya sekolah baru baik SMA maupun SMK, pola pikir dari orangtua siswa pun turut berpengaruh terhadap keputusan memilih SMK. Banyak orangtua yang masih

memiliki pola pikir bahwa SMK merupakan sekolah kedua atau sekolah buangan setelah siswa tidak diterima di SMA. Selain itu, SMK juga dianggap sekolah “murahan” karena lulusannya langsung kerja, tidak seperti SMA yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yaitu universitas.

Selain terdapat pilihan jenis pendidikan antara SMA dan SMK, faktor biaya juga turut berpengaruh dalam penurunan jumlah siswa. Pemerintah Jawa Barat dalam hal ini DPRD sudah mengesahkan APBD 2020 (tempo.co, 2019) yang antara lain memutuskan anggaran sekolah gratis untuk SMA dan SMK negeri. Adanya sekolah gratis ini, menyebabkan sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa. Hal ini karena untuk memilih sekolah swasta, orang tua harus mengeluarkan biaya dan sekolah swasta dianggap sekolah yang mahal. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis, maka kebijakan tersebut berdampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Sekolah swasta tidak mungkin menghapus biaya pendidikan, karena seluruh biaya operasional sekolah diperoleh dari SPP siswa yang dibayarkan tiap bulan.

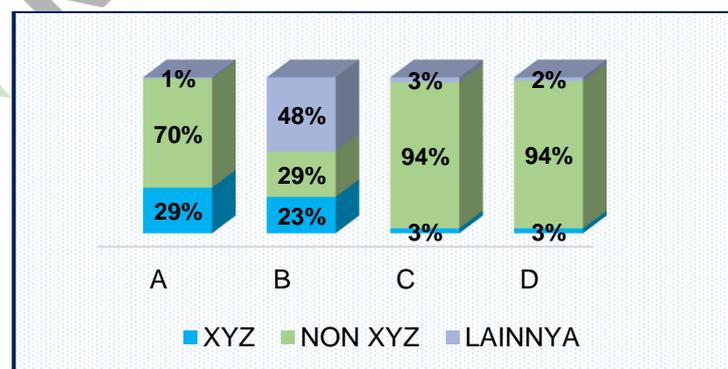
Jurusan yang tersedia di SMK pun turut berpengaruh dalam menentukan jumlah siswa. Di SMK Lembaga XYZ hanya memiliki dua kompetensi keahlian yaitu Akuntansi dan Keuangan Lembaga dan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Kedua jurusan tersebut dianggap tidak *up to date* dan tidak terlalu menarik di tengah perkembangan digital yang semakin pesat. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, dunia industri/kerja menuntut penerapan teknologi dalam setiap kerja. Sehingga diharapkan jurusan yang ada di SMK pun turut mengikuti dengan permintaan industri terutama yang berhubungan dengan teknologi yang semakin canggih atau digitalisasi. Dapat terlihat seperti pada Grafik 1.4 yang menunjukkan bahwa SMA dan SMK Lembaga XYZ di Kota Bekasi tidak menjadi minat dan pilihan dari siswa SMP XYZ itu sendiri.



Grafik 1.3 Jumlah Siswa SMA & SMK (SMP XYZ dan Non XYZ), 2018-2021

Sumber : Lembaga XYZ, 2021 diolah kembali

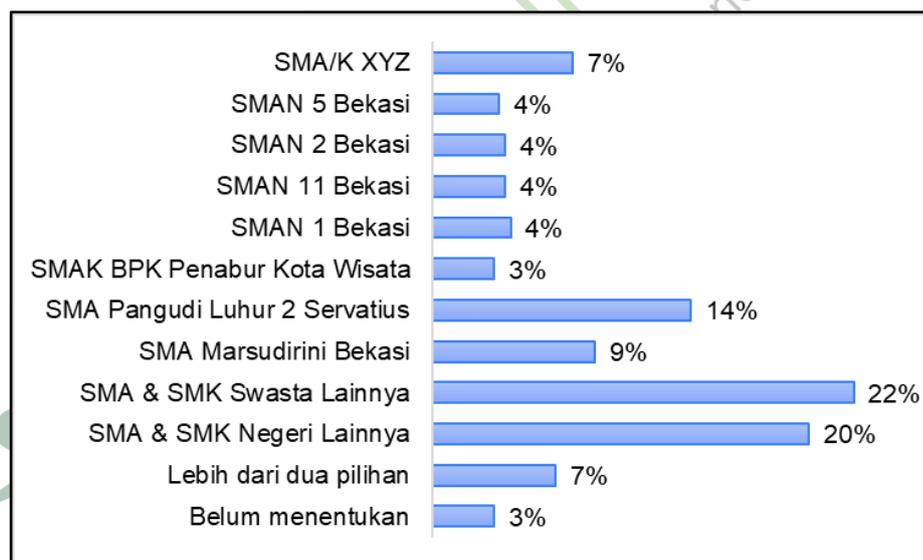
Dapat terlihat berdasarkan grafik 1.4, bahwa siswa yang berasal dari SMP XYZ di SMA dan SMK di Kota Bekasi, cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, walaupun pada jenjang SMK ada kenaikan di awal namun seperti SMA juga turut menurun. Mengapa terjadi, SMA dan SMK XYZ tidak menarik minat siswa? Apakah faktor yang menyebabkannya? Bahkan berdasarkan data yang dapat dilihat dari grafik 1.5, pada tahun 2021 minat SMP XYZ terhadap SMA dan SMK XYZ itu sendiri sangat kecil.



Grafik 1.4 Minat Siswa XYZ terhadap SMA dan SMK XYZ, 2021

Sumber : Lembaga XYZ, 2021 diolah kembali

Pada SMP A dan SMP B, jumlah siswa yang berminat untuk bersekolah di SMA dan SMK XYZ hanya sekitar 29 dan 23 persen, sedangkan SMP C dan SMP hanya sekitar 3 persen. Mengapa hal ini terjadi? Hampir separuh lebih siswa SMP XYZ memilih sekolah lain dibandingkan sekolah XYZ itu sendiri. Faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Berdasarkan tabel 1.5, SMP XYZ diharapkan dapat menjadi pemasok siswa SMA dan SMK XYZ, namun pada kenyataannya berdasarkan grafik 1.4 dan grafik 1.5 ternyata SMP XYZ tidak mampu menjadi pemasok. Data tersebut juga diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti, bahwa minat SMP terhadap SMA/K XYZ sangat rendah yaitu sebesar tujuh persen, seperti tampak pada grafik 1.6 di bawah ini. Menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk menggali lebih lanjut bagaimana meningkatkan minat siswa SMP terhadap SMA dan SMK XYZ.



Grafik 1.5 Pilihan Sekolah Siswa Lulusan SMP

Sumber : Lembaga XYZ, 2021 diolah kembali

Dari penjelasan di atas maka pertanyaan peneliti adalah strategi apa saja yang bisa dikembangkan oleh Lembaga XYZ di Kota Bekasi? SMK bagaimana yang dapat dikembangkan oleh Lembaga XYZ sehingga mampu menarik minat SMP? Hal ini menjadi tantangan bagi Lembaga XYZ untuk menerapkan strategi yang

tepat untuk menarik minat siswa dan menghasilkan lulusan yang berkualitas bagi SMA dan SMK agar mampu mempersiapkan SDM unggul demi terciptanya Indonesia maju dan sesuai dengan perkembangan jaman.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat berbagai masalah yang ditemukan sebagai berikut: “Formulasi strategi yang diterapkan Lembaga XYZ untuk meningkatkan minat siswa SMP terhadap SMA dan SMK XYZ di Area Kota Bekasi”

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dituliskan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:”Bagaimana formulasi strategi dalam menghadapi persaingan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* yang diterapkan oleh Lembaga XYZ untuk meningkatkan minat siswa SMP terhadap SMA dan SMK XYZ di Area Kota Bekasi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut: “Menyusun rekomendasi strategi dengan pendekatan *Balanced Scorecard* dan memberikan rekomendasi strategis dalam bentuk konsep *SMART* yang akan digunakan Lembaga XYZ untuk meningkatkan minat siswa SMP terhadap SMA dan SMK XYZ di Area Kota Bekasi.”

1.5. Manfaat Penelitian

- A. Kegunaan Teoritis/Akademis.
 1. Dapat memberikan sumbangan konsep teoritis tentang model pengembangan strategi bisnis khususnya pendidikan
 2. Dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang akan mengkaji topik yang sama atau mirip di masa mendatang.

B. Kegunaan Praktis.

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi di lembaga XYZ
2. Bagi jajaran direksi, dan pimpinan, diharapkan temuan penelitian menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategik untuk pengembangan sekolah di lembaga XYZ yaitu SMA/SMK XYZ di Area Kota Bekasi.

1.6. Sistematika Penulisan**BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab 1 Pendahuluan menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 Tinjauan Pustaka menguraikan landasan pemikiran teoritik yang meliputi tinjauan teori dan konsep, mengemukakan tinjauan empiris, serta mengemukakan kerangka konseptual penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab 3 Metodologi menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun tesis.

BAB 4 ANALISIS PEMBAHASAN

Bab 4 Analisis Pembahasan menguraikan tentang gambaran umum atau identifikasi perusahaan dan hasil penelitian berupa matrik pengembangan bisnis.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 Kesimpulan dan Saran menguraikan tentang kesimpulan dan saran.